



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2019



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban

anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN**

BUDI KARYA SUMADI

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

R. AGUS H. PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Stakeholders Perspectives					
SS.1	Terwujudnya pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan	IKU.1	Rasio konektivitas transportasi laut antar wilayah	Nilai	1
		IKU.2	Pangsa muatan angkutan laut barang luar negeri oleh pelayaran nasional	%	5
Costumer Perspectives					
SS.2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran	IKU.3	Rasio kejadian kecelakaan pada transportasi laut	kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran)	1,11
		IKU.4	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut	Kejadian/ 100.000 freight (pelayaran)	0,5
SS.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKU.5	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	80,00
SS.4	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim	IKU.6	Persentase penanggulangan tumpahan minyak yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari kegiatan pelayaran	%	100
Internal Business Process Perspective					
SS.5	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan transportasi laut	IKU.7	Rasio rancangan dan peraturan perundangan di bidang pelayaran yang ditetapkan	Rasio	1
SS.6	Terlaksananya pembinaan teknis transportasi laut	IKU.8	Persentase pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan	%	100
SS.7	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKU.9	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut penumpang	%	25,18
		IKU.10	Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi laut barang	%	12,56
		IKU.11	Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut (pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian/ pengembangan pelabuhan non-komersial)	%	90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS.13	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Persentase kehandalan sistem Informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.27	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert 1-</i>	Nilai	4
SS.14	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i> di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.28	Tingkat kualitas akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP	87.00
		IKU.29	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.15	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang optimal	IKU.30	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.31	Nilai BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56,418,617,607,856
		IKU.32	Target PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	3,716,688,810,520

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1,534,776,845.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	4,050,072,286.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	50,076,260.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	533,037,823.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	232,558,350.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3,910,631,725.000
Jumlah	10,311,153,289.000

(sepuluh triliun tiga ratus sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO